

# Tipologi Relasi Gereja dan Pemerintah Menurut Philip J. Wogaman: Konstruksi Teologi Publik Perspektif Pentakostal di Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.47543/efata.v11i1.91>Anggi Maringan Hasiholan<sup>1</sup>, Harls Evan R. Siahaan<sup>2</sup><sup>1</sup>Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia, Jakarta<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest, TangerangCorrespondence: [anggimaringan@sttbi.ac.id](mailto:anggimaringan@sttbi.ac.id)

**Abstract:** The typology of church and government relations proposed by Philip J. Wogaman provides a conceptual framework for understanding the levels of church engagement in the public sphere. This study explores how Pentecostal communities in Indonesia can actively participate in the socio-political arena without losing their theological identity. Through the seven levels of participation, the church can influence societal ethos, educate congregations, and even take more radical steps, such as civil disobedience. However, political neutrality for the sake of peace is not included in the levels of participation outlined by Wogaman. By integrating pneumatological values and public theology principles, Pentecostal churches hold significant potential to become social and spiritual transformation agents, addressing the challenges of religious pluralism, poverty, and social injustice in Indonesia.

**Keywords:** church-state relations; public theology; Pentecostal; social transformation; Wogaman's typology

**Abstrak:** Tipologi relasi gereja dan pemerintah menurut Philip J. Wogaman memberikan kerangka konseptual untuk memahami level keterlibatan gereja dalam ruang publik. Penelitian ini membahas bagaimana komunitas Pentakostal di Indonesia dapat berperan aktif dalam ranah sosial-politik tanpa kehilangan identitas teologisnya. Melalui tujuh tipologi partisipasi, gereja dapat memengaruhi etos masyarakat, mendidik jemaat, hingga mengambil langkah-langkah yang lebih radikal seperti pembangkangan sosial. Namun, netralitas politik demi perdamaian tidak termasuk dalam kategori partisipasi yang disebutkan oleh Wogaman. Dengan pendekatan yang mengintegrasikan nilai pneumatologis dan prinsip teologi publik, gereja Pentakostal memiliki potensi besar untuk menjadi agen transformasi sosial dan spiritual, menjawab tantangan pluralisme agama, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pentakostal; relasi gereja-negara; teologi publik; tipologi Wogaman; transformasi sosial

## PENDAHULUAN

Ekspansi gerakan Pentakostal secara pesat telah menempatkannya sebagai salah satu poros utama dalam diskursus teologi global. Gerakan ini tidak lagi sekadar suara dari pinggir yang berjuang untuk diakui, tetapi kini telah bertransformasi menjadi “aktor” penting dalam lanskap keagamaan global. Menurut Edmund Kee-Fook Chia, populasi penganut Pentakostal diproyeksikan mencapai 30% dari total umat Kristen global, atau sekitar 790 juta orang pada tahun 2025. Pertumbuhan yang signifikan ini terutama terkonsentrasi di wilayah Dunia Selatan, dengan Asia diperkirakan menjadi kawasan dengan jumlah penganut

Pentakostal terbesar.<sup>1</sup> Tren ini menunjukkan pergeseran kekuatan teologis dan demografis dari wilayah Barat ke kawasan *Global South*, mempertegas relevansi Pentakostal dalam mengartikulasikan spiritualitas dan teologi yang kontekstual dan dinamis, termasuk dalam konteks sosial politik.

Brenda Bartelink mencatat bahwa pendekatan Pentakostal sering kali menekankan moralitas individu dan keluarga, yang terkadang bertentangan dengan kebutuhan kolektif masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini perlu diimbangi dengan kesadaran akan dinamika sosial-politik lokal. Gereja-gereja Pentakostal harus mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada penyelamatan personal tetapi juga pada transformasi masyarakat.<sup>2</sup> Namun menurut Mark J. Cartledge, kaum Pentakostal semakin diakui sebagai komunitas Kristen yang aktif terlibat dalam masyarakat luas demi kepentingan bersama.<sup>3</sup> Peneliti juga sepakat dengan Cartledge bahwa wawasan dan kiprah Pentakostal dalam ranah sosial mulai mengemuka dan terasa.<sup>4</sup> Perkembangan ini bukan tanpa tantangan. Di beberapa wilayah, di Amerika, Afrika, dan Asia, dorongan sektarian masih kuat, sementara di tempat lain muncul kecenderungan menuju teokrasi. Meskipun demikian, keterlibatan sosial dan komunal kaum Pentakostal mulai dipetakan oleh berbagai penelitian, terutama oleh ilmuwan sosial. Selain itu, diskusi teologis tentang pendekatan sosial dan politik Pentakostal semakin berkembang, menunjukkan upaya untuk memperluas kontribusi umat Pentakostal terhadap isu-isu publik.<sup>5</sup> Namun, satu aspek yang masih kurang diperhatikan adalah wacana teologis dalam konteks "teologi publik" atau "teologi kehidupan publik".<sup>6</sup> Hal ini sangat relevan terutama di Indonesia, di mana kaum Pentakostal tidak hanya berperan sebagai kelompok religius tetapi juga sebagai warga negara yang berpartisipasi dalam ruang-ruang publik.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Edmund Kee-Fook Chia, *Asian Christianity and Theology: Inculturation, Interreligious Dialogue, Integral Liberation* (London & New York: Routledge, 2022), 203.

<sup>2</sup> Brenda Bartelink, "The Personal Is Political: Pentecostal Approaches to Governance and Security," *Review of Faith and International Affairs* 18, no. 3 (2020): 69–75.

<sup>3</sup> Mark J. Cartledge, "British Pentecostalism and Public Theology: Navigating the Path between Discipleship and Citizenship," *Journal of the European Pentecostal Theological Association* 41, no. 2 (2021): 108–123, <https://doi.org/10.1080/18124461.2021.1954259>.

<sup>4</sup> Anggi Maringan Hasiholan, "Spiritualitas dan Teologi Sosial Pentakostal Asia," *Manna Rafflesia* 10, no. 1 (2023): 358–377.

<sup>5</sup> Cartledge, "British Pentecostalism and Public Theology: Navigating the Path between Discipleship and Citizenship."

<sup>6</sup> Teologi publik adalah cabang teologi yang merefleksikan dan memengaruhi isu-isu dalam kehidupan publik dengan mengintegrasikan nilai-nilai iman dalam diskursus sosial. Menurut Elaine Graham dan Stephen Lowe, teologi publik berfokus pada kebaikan bersama (*common good*) dan berada di persimpangan antara pemuridan Kristen dan kewarganegaraan, membantu menjawab bagaimana seorang Kristen dapat setia kepada Yesus Kristus sekaligus bertanggung jawab sebagai warga negara. Dalam hal ini, ruang publik, mencakup enam domain utama: negara, pasar, masyarakat sipil, akademi, komunitas religius, dan media. Ruang publik ini menjadi arena tempat berbagai sektor berinteraksi, memberikan peluang bagi teologi publik untuk menghubungkan nilai-nilai religius dengan praktik sosial dan politik yang lebih luas. Dengan demikian, teologi publik menjadi sarana bagi komunitas Kristen untuk terlibat secara konstruktif dalam transformasi sosial, aksi kolektif, dan kolaborasi lintas agama, menjadikannya bukan hanya wacana akademis tetapi juga alat praktis untuk menciptakan perubahan yang bermakna. Lihat Elaine Graham and Stephen Lowe, *What Makes a Good City? Public Theology and the Urban Church* (Darton, Longman & Todd Ltd, 2009).

<sup>7</sup> Dalam bahasa Jerman, ruang publik menggunakan istilah *Offentlichkeit* yang artinya "keadaan terbuka" dan "dapat diakses oleh semua orang". Ruang publik menjadi lokus penyatuan yang mendamaikan konflik-konflik, klaim-klaim yang bersaing, dan perbedaan-perbedaan yang tidak dapat terselesaikan. Menurut Budi F. Hardiman, dalam konteks politik, khususnya negara demokratis, rakyat disebut berdaulat jika negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif tersambung secara diskuritif dengan proses

Relevansi teologi publik tidak terbatas pada pendekatan normatif terhadap isu-isu sosial. Dalam banyak kasus, gereja-gereja Pentakostal berfungsi sebagai penyedia layanan sosial ketika negara gagal memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup> Fenomena ini menekankan bagaimana gereja dapat mengambil alih peran negara, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas etis antara pelayanan gereja dan fungsi negara. Dalam konteks teologi publik, pendekatan ini perlu diimbangi dengan kesadaran akan dinamika sosial-politik lokal. Gereja-gereja Pentakostal harus mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada penyelamatan individu tetapi juga pada transformasi masyarakat

Penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan mendasar: (1) bagaimana kaum Pentakostal di Indonesia memandang keterlibatannya dengan masyarakat? (2) bagaimana para sarjana Pentakostal dan akademisi yang meneliti Pentakostalisme mengartikulasikan keterlibatan teologis mereka dengan isu-isu publik? dan (3) seperti apa model teologi publik yang dapat dikembangkan di masa depan, serta jenis praksis gerejawi yang mungkin didorong oleh pneumatologi Pentakostalisme? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin penting karena peran kaum Pentakostal di Indonesia tidak hanya terbatas pada ekspresi iman personal atau gerejawi tetapi juga mencakup bagaimana mereka menavigasi ruang-ruang publik secara kreatif dan relevan.

Di Indonesia, sebagai minoritas di tengah mayoritas Muslim, komunitas Pentakostal diperhadapkan pada dilema mempertahankan identitas teologis sembari berkontribusi pada kohesi sosial. Tipologi relasi gereja dan negara menurut Philip J. Wogaman memberikan landasan penting untuk memahami interaksi gereja dengan pemerintah melalui pendekatan antagonistik, kooperatif, atau kritis-konstruktif.<sup>9</sup> Dalam konteks Indonesia, tipologi ini relevan untuk menjelaskan bagaimana gereja Pentakostal di Indonesia dapat memainkan peran konstruktif tanpa kehilangan identitasnya. Tantangan utamanya adalah mengintegrasikan teologi publik dalam praksis gereja sehari-hari, yang hingga kini sering terabaikan. Diskursus teologi publik Pentakostal membutuhkan landasan pneumatologis yang kuat. Amos Yong menyoroti pentingnya Roh Kudus sebagai kekuatan transformatif dalam kehidupan sosial.<sup>10</sup> Pendekatan pneumatologis politik memungkinkan umat Pentakostal untuk tidak hanya berperan sebagai saksi iman, tetapi juga agen perubahan sosial. Di Indonesia, dengan tantangan seperti kemiskinan, korupsi, dan ketidakadilan, teologi publik dapat menjadi alat penting untuk menghadirkan transformasi. Peneliti berargumen dengan mengintegrasikan tipologi relasi Wogaman dan pendekatan pneumatologis, diharapkan gereja-gereja Pentakostal dapat menjadi agen transformasi sosial dan spiritual yang lebih efektif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang dilakukan melalui tiga langkah utama yang saling berkaitan. Kajian literatur mendalam menjadi langkah pertama untuk menganalisis tipologi relasi gereja dan pemerintah menurut Philip J. Wogaman, dengan eksplorasi karya utamanya untuk memahami kerang-

---

pembentukan aspirasi dan opini dalam ruang publik. Lihat Budi F Hardiman, "Demokrasi Delibelatif: Model Untuk Indonesia Pasca-Soeharto?," *Basis*, 2004.

<sup>8</sup> Miller dan Yamamori banyak memberikan fakta kiprah umat Pentakostal dari dunia Selatan yang dirasakan oleh komunitas yang lebih luas. Baca: Donald E. Miller and Tetsunao Yamamori, *Pentecostalism Global: The New Face of Christian Social Engagement* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2016).

<sup>9</sup> J. Philip Wogaman, *Christian Perspectives on Politics* (Louisville: Westminster John Knox Press, 2000).

<sup>10</sup> Amos Yong, *In the Days of Caesar: Pentecostalism and Political Theology* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing, 2010).

ka konseptual dalam hubungan gereja dan negara. Langkah kedua menganalisis wawasan sosial-politik komunitas Pentakostal di Indonesia dalam ruang sosial-politik dengan mengidentifikasi bentuk keterlibatan sosial, kontribusi nyata terhadap masyarakat, serta tantangan yang dihadapi sebagai minoritas, berdasarkan studi kasus pengalaman lokal gereja-gereja Pentakostal, termasuk program pelayanan sosial. Hasil dari kedua langkah tersebut diintegrasikan pada langkah ketiga untuk mengembangkan konstruksi teologi publik Pentakostal yang mengombinasikan wawasan tipologi Wogaman dengan pendekatan pneumatologis khas tradisi Pentakostal, menghasilkan model teologi publik yang kontekstual-relevan berbasis hospitalitas dan teopoetik dalam menghadapi tantangan pluralisme agama, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Tipologi Relasi Gereja dan Pemerintah menurut Philip J. Wogaman

Philip J. Wogaman adalah seorang teolog dan etikus Kristen terkemuka yang dikenal kontribusinya dalam bidang teologi sosial, etika politik, dan hubungan antara gereja dan negara. Ia adalah seorang profesor emeritus di Wesley Theological Seminary di Washington, D.C., di mana ia mengajar selama bertahun-tahun dan menjadi dekan. Wogaman dikenal karena pendekatannya yang kritis dan konstruktif dalam memahami bagaimana nilai-nilai Kristen dapat diterapkan dalam konteks politik dan sosial modern. Karya-karyanya, seperti *"Christian Perspectives on Politics"* dan *"Christian Ethics: A Historical Introduction"*, menggambarkan pemikirannya yang mendalam tentang peran gereja dalam ruang publik. Ia menawarkan tipologi relasi gereja dan pemerintah yang memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana gereja dapat berinteraksi dengan negara secara etis dan bertanggung jawab. Selain akademisnya, Wogaman juga pernah menjadi pastor dan pemimpin komunitas gereja di Foundry United Methodist Church, termasuk melayani sebagai gembala gereja Presiden Bill Clinton. Pengalaman ini memberikan perspektif praktis yang kuat terhadap ide-ide teologis dan etikanya, menjadikannya salah satu tokoh berpengaruh dalam membahas keterlibatan gereja dalam isu-isu sosial dan politik. Wogaman merumuskan tujuh level partisipasi yang dapat dilakukan kelompok agama dalam melakukan tanggung jawab/partisipasi politiknya.

Pertama, agama dapat berpartisipasi memengaruhi etos. Agama memiliki peran penting dalam memengaruhi etos masyarakat, termasuk dalam membentuk roh zaman dan memberikan makna terhadap aksi-aksi politik yang berlangsung di dalam negara. Pada model ini, gereja dan umat Kristen dapat berpartisipasi secara aktif dengan berusaha mengarahkan kebijakan dan program politik agar selaras dengan nilai-nilai kultural yang mencerminkan prinsip-prinsip iman mereka. Partisipasi ini terlihat dalam upaya untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan bermartabat, terutama ketika kebijakan yang ada bertentangan dengan nilai-nilai fundamental agama. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, gereja secara historis memainkan peran signifikan dalam menentang segregasi sosial berbasis warna kulit, karena praktik ini dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen yang menekankan kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat setiap individu.<sup>11</sup> Perjuangan gereja untuk melawan segregasi menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya agama untuk memengaruhi roh zaman dan mendorong realisasi nilai-nilai kultural yang lebih manusiawi dan inklusif. Dengan demikian, peran agama tidak hanya terbatas pada ruang

---

<sup>11</sup> Wogaman, *Christian Perspectives on Politics*, 264–265.

spiritual, tetapi juga meluas ke ranah sosial-politik, memberikan panduan etis bagi tindakan-tindakan politik di masyarakat.

Kedua, agama dapat berpartisipasi mendidik anggota gereja mengenai isu-isu khusus yang terjadi dalam negara. Hal ini menjadi sangat esensial karena tidak semua jemaat dan anggota jemaat memiliki pemahaman yang memadai atau sudut pandang yang benar terkait isu-isu politik dan sosial yang kompleks. Gereja, dalam konteks ini, mengambil tanggung jawab untuk menjembatani ajaran iman yang bersifat universal dengan permasalahan politik yang lebih khusus. Melalui pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai iman, gereja dapat membantu jemaat memahami implikasi etis dari kebijakan publik dan tindakan politik, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab secara moral. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, pada awal 1980-an, para uskup Katolik mengembangkan berbagai dokumen kajian mendalam terkait isu-isu krusial seperti perang nuklir dan kehidupan ekonomi. Dokumen-dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teologis, tetapi juga sebagai alat pendidikan untuk mengarahkan umat memahami isu-isu tersebut dari perspektif iman Katolik yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan bersama.<sup>12</sup> Dengan demikian, peran gereja dalam mendidik jemaatnya tidak hanya relevan, tetapi juga vital dalam memastikan bahwa komunitas religius dapat terlibat secara bermakna dalam diskursus publik dengan pemahaman yang matang dan sikap yang etis.

Ketiga, agama dapat berpartisipasi menggiatkan lobi gereja. Agama berperan penting dalam menggiatkan upaya lobi gereja, yang dapat dilakukan melalui berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Lobi langsung biasanya diarahkan kepada pihak pemerintah atau lembaga legislatif, di mana gereja secara eksplisit menyampaikan pandangan atau usulan terkait kebijakan tertentu. Namun, lobi tidak langsung sering kali dianggap lebih efektif, terutama melalui advokasi legislasi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu tertentu. Strategi ini melibatkan komunikasi yang intens dengan para legislator, seperti mengirimkan surat, petisi, atau dokumen yang menjelaskan posisi gereja mengenai suatu kebijakan. Tujuan dari pendekatan ini adalah menciptakan kesan, atau kadang-kadang ilusi, bahwa pandangan yang diajukan memiliki dukungan luas dari masyarakat. Pendekatan ini dapat memperkuat pengaruh gereja dalam proses legislasi dan mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan nilai-nilai etis dalam penyusunan kebijakan.<sup>13</sup> Dengan demikian, lobi gereja bukan hanya alat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif agama dalam memengaruhi arah kebijakan publik demi kebaikan bersama.

Keempat, agama dapat berpartisipasi mendukung calon-calon tertentu bagi suatu jabatan. Dalam tipologi ini, agama memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan kepada calon-calon tertentu untuk menduduki jabatan publik. Di Amerika Serikat, misalnya, gereja-gereja etnis sering kali secara langsung mendukung kandidat yang memiliki rekam jejak positif dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dukungan ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh komunitas gereja, tetapi juga menjadi cara untuk mendorong kehadiran pemimpin yang berkomitmen pada prinsip-prinsip moral dan etis dalam pemerintahan. Namun, tantangan sering kali muncul ketika terdapat banyak kandidat yang mencalonkan diri, terutama jika program kerja yang mereka tawarkan tidak jelas atau saling bertentangan. Dalam situasi seperti ini, gereja memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan evaluasi yang cermat terhadap rekam

---

<sup>12</sup> Wogaman, *Christian Perspectives on Politics*, 265–266.

<sup>13</sup> Wogaman, *Christian Perspectives on Politics*, 267.

jejak masing-masing kandidat. Penilaian objektif menjadi kunci agar dukungan gereja tidak hanya berdasarkan preferensi subjektif, tetapi benar-benar berlandaskan pada visi dan komitmen kandidat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan dengan iman Kristen.<sup>14</sup> Dengan demikian, partisipasi gereja dalam mendukung kandidat tertentu tidak hanya mencerminkan keterlibatan politik, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memajukan kepemimpinan yang berintegritas.

Kelima, agama dapat berpartisipasi menjadi partai politik. Kehadiran partai-partai demokrat Kristen di Eropa dan Amerika Latin menjadi bukti bahwa umat Kristen telah menempuh perjalanan panjang dalam mengintegrasikan nilai-nilai keimanan mereka ke dalam ranah politik. Dalam konteks tertentu, seperti pada era Nazi di bawah Hitler, gereja-gereja merasa terpaksa berpihak secara politis untuk menghadapi ketidakadilan dan kekuasaan yang menindas. Dalam situasi semacam itu, pendirian partai politik oleh gereja dianggap sebagai langkah terakhir ketika semua upaya lain untuk memengaruhi kebijakan melalui cara-cara biasa tidak membuahkan hasil. Namun, tindakan ini bukanlah keputusan yang diambil sembarangan. Gereja hanya akan mengambil langkah ini dalam keadaan kritis, ketika nilai-nilai moral dan kemanusiaan berada di bawah ancaman serius, dan tidak ada alternatif lain untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran.<sup>15</sup> Dengan demikian, keterlibatan agama dalam politik melalui pembentukan partai mencerminkan tanggung jawab moral yang mendalam untuk melindungi nilai-nilai universal dalam menghadapi situasi yang mendesak.

Keenam, agama dapat berpartisipasi melakukan pembangkangan sosial. Dalam tipologi ini, agama dapat berpartisipasi dalam politik melalui tindakan pembangkangan sosial, terutama terhadap undang-undang atau produk hukum lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip moral atau nilai-nilai keimanan. Tindakan ini menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya lain gagal. Sebagai contoh, Martin Luther King Jr. adalah salah satu tokoh yang menempuh jalan ini untuk melawan ketidakadilan rasial di Amerika Serikat. Pembangkangan sosial harus memenuhi beberapa syarat penting agar tetap memiliki legitimasi moral, yaitu dilakukan secara terbuka, tanpa kekerasan, dan disertai kesediaan untuk menerima konsekuensi hukum dari tindakan tersebut.<sup>16</sup> Dalam beberapa kasus, pembangkangan sosial bahkan digunakan untuk menegaskan bahwa suatu undang-undang tertentu melanggar konstitusi dan karenanya perlu ditinjau ulang. Dengan cara ini, agama berfungsi sebagai suara moral yang menantang ketidakadilan, sekaligus mendorong perubahan struktural yang mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Tindakan ini bukan hanya bentuk protes, tetapi juga pernyataan iman yang kuat bahwa keadilan harus ditegakkan, meskipun menghadapi risiko dan tantangan.

Ketujuh, agama dapat berpartisipasi dalam revolusi. Agama juga dapat berpartisipasi dalam revolusi, meskipun langkah ini dianggap sebagai bentuk keterlibatan politik yang paling serius dan hanya diambil dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Partisipasi dalam revolusi melibatkan upaya untuk merekonstitusi ulang perjanjian politik secara mendasar, yang sering kali mencakup penggantian sistem pemerintahan atau struktur kekuasaan yang ada. Wogaman menegaskan bahwa tindakan revolusi ini dapat melibatkan penggunaan kekerasan, meskipun hal tersebut hanya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir ketika semua cara lain telah gagal.<sup>17</sup> Dalam perspektif Kristen, partisipasi dalam revolusi ha-

---

<sup>14</sup> Wogaman, *Christian Perspectives on Politics*, 268–269.

<sup>15</sup> Wogaman, *Christian Perspectives on Politics*, 269.

<sup>16</sup> Wogaman, *Christian Perspectives on Politics*, 270.

<sup>17</sup> Wogaman, *Christian Perspectives on Politics*, 271.

rus didasarkan pada keyakinan bahwa keadaan sudah sangat serius sehingga memerlukan perubahan radikal demi mengembalikan keadilan dan kebenaran. Langkah ini mencerminkan tanggung jawab moral yang besar untuk melawan ketidakadilan struktural, meskipun dengan risiko yang signifikan. Namun, gereja juga dituntut untuk mempertimbangkan dampak etis dan kemanusiaan dari tindakan tersebut, sehingga keputusan untuk berpartisipasi dalam revolusi harus dilakukan dengan kehati-hatian dan refleksi mendalam.

Wogaman selanjutnya menegaskan relasi gereja dan negara dalam empat model utama yang menggambarkan spektrum hubungan ini dalam sejarah dan praktik politik. Model pertama, teokrasi, menunjukkan negara berada di bawah kendali otoritas agama demi tujuan agama tertentu, sementara model kedua, erastianisme, menunjukkan sebaliknya, di mana pemimpin politik mengontrol agama untuk kepentingan negara. Model ketiga, pemisahan gereja dan negara secara ramah, memungkinkan hubungan yang saling menghormati tanpa kekerasan, seperti yang idealnya diterapkan di Amerika Serikat. Sebaliknya, model keempat, pemisahan gereja dan negara yang tidak bersahabat, mencerminkan situasi seperti gerakan anti-klerikalisme di Prancis pada abad ke-19. Dalam kerangka ini, pilihan nomor empat dalam tipologi Wogaman menjadi batas kritis yang menandai pergeseran gereja dari peran sebagai pengajar moral internal menuju keterlibatan politik praktis secara langsung. Model ini mencerminkan perubahan signifikan dalam cara gereja mendekati tanggung jawab sosial dan politiknya.

Keterlibatan gereja dalam politik praktis, sebagaimana terlihat dalam pilihan keempat hingga ketujuh tipologi Wogaman, mencerminkan aksi yang lebih aktif di luar lingkup internalnya. Gereja dapat melompati tahapan tertentu untuk langsung terlibat dalam dinamika politik, tergantung pada urgensi situasi dan konteks sosial. Dalam hal ini, gereja sering dianggap sebagai institusi yang berpengaruh, terutama di wilayah di mana gereja memiliki pengikut mayoritas. Namun, pengaruh ini juga dapat menimbulkan risiko, seperti manipulasi mimbar khotbah untuk kepentingan politik tertentu. Karena jemaat sering kali memercayai pendeta sebagai pembawa Firman Tuhan, khotbah dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan politik terselubung. Oleh karena itu, penting bagi gereja untuk memegang kode etik yang tegas, termasuk memastikan bahwa mimbar khotbah tetap menjadi ruang sakral yang tidak digunakan untuk kampanye politik. Risiko manipulasi ini menuntut gereja untuk mengelola keterlibatan politiknya dengan hati-hati dan bijaksana.

Dalam konteks sejarah, pemisahan gereja dan negara seperti yang digambarkan dalam tipologi Wogaman dapat dikaitkan dengan kasus Martin Luther dan Ajaran Dua Kerajaan (ADK) yang menegaskan pemisahan tanggung jawab antara urusan duniawi dan rohani. Luther, meskipun sering disalahpahami sebagai pendukung subordinasi gereja kepada negara, sebenarnya lebih cocok ditempatkan dalam model pemisahan ramah. Ia menegaskan bahwa gereja tetap tunduk kepada Allah tetapi juga memiliki tanggung jawab profetik untuk menjadi suara moral di tengah masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan tipologi Wogaman yang menempatkan gereja sebagai agen transformatif dalam masyarakat. Di sisi lain, contoh seperti Martin Luther King Jr., yang memimpin gerakan revolusioner melawan ketidakadilan struktural, menunjukkan bagaimana gereja dapat melampaui peran tradisionalnya untuk mengambil tindakan radikal ketika situasi menuntut. Kombinasi pandangan ini menunjukkan bahwa keterlibatan gereja dalam politik praktis harus selalu disertai dengan refleksi moral dan kesadaran akan tanggung jawabnya kepada Allah dan masyarakat.

## **Wawasan Politik, Demokrasi, dan Mobilitas Sosial ke Atas Pentakostal Global**

Pada masa lalu, struktur politik sering kali dianggap sebagai kejahatan dunia oleh komunitas Pentakostal, yang mendorong sikap pasif dalam dunia politik. Pandangan ini mencerminkan pendekatan dan penekanan tradisional Pentakostal yang menghindari keterlibatan langsung dalam isu-isu politik, dengan menganggapnya sebagai tanda negatif zaman yang sebaiknya dihindari, sebagaimana dicatat oleh Anderson. Ketika ada keterlibatan sosial, tindakan Pentakostal dalam konteks politik lebih berfokus pada aspek filantropis dan pendidikan. Hal ini terlihat dalam pendirian institusi seperti panti asuhan, sekolah, dan pusat penyelamatan. Beberapa contoh penting dari karya ini adalah pelayanan Albert Norton di India, Mok Lai Chi di Hong Kong, dan Lillian Trasher di Mesir, yang menunjukkan bagaimana misi Pentakostal diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sosial tanpa secara langsung terlibat dalam struktur politik. Pendekatan ini mencerminkan prioritas Pentakostal untuk melayani masyarakat melalui cara-cara yang lebih spiritual dan praktis daripada politis.<sup>18</sup> Yong juga mengakui ada kontradiksi “menjadi pentakostal” dengan “menjadi politik”.<sup>19</sup> Keadaan ini, yaitu kurangnya perhatian terhadap keterlibatan politik komunitas Pentakostal, tampaknya terabaikan—apakah secara tidak sengaja atau memang disengaja—dalam kajian Miller dan Yamamori. Dalam perjumpaan mereka dengan berbagai gereja, organisasi, dan tokoh-tokoh Pentakostal di dunia, isu keterlibatan politik hampir tidak mendapatkan porsi pembahasan yang memadai. Meskipun demikian, wawasan dan gagasan mereka mengenai Pentakostalisme Progresif tetap patut diapresiasi, karena mampu memberikan perspektif baru tentang peran Pentakostal dalam aspek sosial dan spiritual, terutama melalui pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada transformasi komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun isu politik tidak menjadi fokus utama, kontribusi mereka tetap penting dalam memahami dinamika dan perkembangan Pentakostalisme di era modern.

Pentakostalisme Progresif memiliki karakteristik yang berbeda dengan Injil Sosial atau Teologi Pembebasan, terutama dalam pendekatan politiknya yang relatif nonpolitis. Pentakostal Progresif cenderung tidak berfokus pada upaya reformasi struktur sosial atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, derajat keterlibatan politik komunitas Pentakostal sangat bervariasi di berbagai negara, tergantung pada konteks sosial dan politik setempat.<sup>20</sup> Di negara-negara di mana umat Kristen, termasuk Pentakostal, merupakan kelompok minoritas, ruang geraknya dalam bidang politik sering kali terbatas, sehingga keberanian untuk terlibat aktif dalam isu-isu politik pun relatif rendah. Sebaliknya, di negara-negara mayoritas Kristen, konflik cenderung terjadi antara berbagai tradisi atau denominasi Kristen yang berbeda, mencerminkan dinamika politik internal yang lebih kompleks di dalam komunitas agama tersebut. Di negara-negara dengan kebebasan beragama yang relatif besar, seperti Kenya dan Uganda, umat Pentakostal memiliki kebebasan yang lebih luas untuk mengkritik kebijakan pemerintah, terutama dalam hal korupsi, karena mereka berada di posisi mayoritas secara demografis. Namun, situasinya berbeda di negara-negara seperti India, di mana keberadaan umat Pentakostal berada di tengah-tengah masyarakat mayoritas Hindu atau Muslim. Dalam konteks ini, mereka harus berhati-hati

---

<sup>18</sup> Allan Heaton Anderson, “Pentecostalism and Social, Political, and Economic Development,” *Spiritus* 5, no. 1 (2020): 125.

<sup>19</sup> Amos Yong, *In the Days of Caesar: Pentecostalism and Political Theology* (Grand Rapids: William B. Eerdmans, 2010), xvii.

<sup>20</sup> Miller and Yamamori, *Pentecostalism Global: The New Face of Christian Social Engagement*, 5.

dalam aktivitas politik apa pun yang berpotensi menimbulkan konflik dengan kelompok mayoritas. Variabilitas ini menunjukkan bahwa keterlibatan politik Pentakostal tidak dapat dipandang secara seragam, tetapi harus dipahami berdasarkan konteks sosial, budaya, dan politik yang melingkupi masing-masing komunitas, mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas mereka terhadap tantangan dan peluang lokal.

Buku Bunga Rampai *Pentecostalism and Prosperity* menggambarkan bagaimana ajaran para pendeta Pentakostal sering mendorong jemaat untuk tabah dan berdamai dengan ketidakadilan sosial, termasuk dalam konteks politik, serta kondisi kehidupan yang mereka alami. Pendekatan ini, menurut banyak pengamat, dipengaruhi oleh kebijakan kapitalis neoliberal yang mendasari struktur ekonomi global. Misalnya, Eloy H. Nolivos mengungkapkan bahwa di Amerika Latin, Pentakostalisme secara tidak langsung memfasilitasi adaptasi terhadap pasar tenaga kerja neoliberal. Melalui ajarannya, jemaat didorong untuk mengembangkan kemandirian, kewirausahaan, kerja keras, dan fleksibilitas, sekaligus memupuk rasa percaya diri dan harga diri. Namun, pendekatan ini juga menciptakan konflik sosial, karena nilai-nilai individualis yang diusung sering kali bertentangan dengan kebutuhan komunal.<sup>21</sup> Geraldo Marti menegaskan bahwa teologi kemakmuran berkembang di tengah-tengah globalisasi kapitalisme modern yang progresif, menjadikannya bagian dari narasi ekonomi global yang mendorong konsumsi dan materialisme.<sup>22</sup>

Kontras ini semakin jelas dalam analisis Daniela Augustine, yang membandingkan nilai-nilai komunitarian di Eropa Timur dengan ideologi neoliberal yang mengedepankan konsumerisme individualis. Augustine berpendapat bahwa injil kemakmuran berfungsi sebagai *platform* spiritual bagi masyarakat yang menghadapi kegagalan dalam upaya pema-juan ekonomi. Dalam konteks tertentu, injil kemakmuran mulai beradaptasi dengan dinamika lokal, mengambil alih pemikiran dan perasaan masyarakat dengan menawarkan solusi spiritual untuk kebutuhan ekonomi pribadi mereka.<sup>23</sup> Di beberapa komunitas, injil kemakmuran bahkan mengintegrasikan tuntutan individualis dengan kebutuhan komunal, menciptakan perpaduan antara keinginan ekonomi pribadi dan tuntutan sosial yang lebih luas. Fenomena ini menunjukkan bagaimana teologi kemakmuran tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kapitalis global tetapi juga bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik komunitas lokal di tengah dinamika ekonomi global.

Kaum Pentakostal sering kali mengadopsi posisi politik sayap kanan dengan mendukung kandidat atau partai yang dianggap mewakili "nilai-nilai Kristen," tanpa secara kritis menilai kebijakan atau praktik lain yang mungkin bertentangan dengan ajaran iman mereka. Pendekatan ini sering kali dipengaruhi oleh pandangan eskatologi premilenial, yang memandang Komunisme dan Islam radikal sebagai ancaman anti-Kristen. Dalam kerangka teologis ini, dukungan terhadap negara Israel dianggap sebagai kewajiban alkitabiah yang tidak dapat diganggu gugat, sementara oposisi terhadap Palestina dipandang sebagai konsekuensi logis dari sikap tersebut. Pandangan ini, meskipun memiliki dasar dalam tafsir alkitabiah tertentu, sering kali mengabaikan kompleksitas eskalasi politik dan konflik kema-

---

<sup>21</sup> Eloy H. Nolivos, "Capitalism and Pentecostalism in Latin America: Trajectories of Prosperity and Development," in *Pentecostalism and Prosperity: The Socioeconomics of the Global Charismatic Movement*, ed. Katherine Attanasi and Amos Yong (New York: Palgrave Macmillan, 2012), 87–106.

<sup>22</sup> Geraldo Marti, "I Determine My Harvest": Risky Careers and Spirit-Guided Prosperity in Los Angeles," in *Pentecostalism and Prosperity: The Socioeconomics of the Global Charismatic Movement*, ed. Katherine Attanasi and Amos Yong (New York: Palgrave Macmillan, 2012), 131–150.

<sup>23</sup> Daniela C. Augustine, "Pentecost and Prosperity in Eastern Europe: Between Sharing of Possessions and Accumulating Personal Wealth," in *Pentecostalism and Prosperity: The Socioeconomics of the Global Charismatic Movement*, ed. Katherine Attanasi and Amos Yong (New York: Palgrave Macmillan, 2012), 189–212.

nusiaan di wilayah seperti Jalur Gaza. Akibatnya, sikap ini menuai kritik karena dianggap memperkuat polarisasi tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan perdamaian yang juga diajarkan dalam iman Kristen.<sup>24</sup>

Pentakostal progresif pada akhirnya berfokus pada misi holistik yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengakui bahwa Roh Kudus bersifat universal dalam karya penciptaan dan penebusan, bukan partikular. Misi holistik, sebagaimana dipaparkan oleh Andrew Lord, melibatkan tujuh elemen utama: penginjilan, penyembuhan, aksi sosial, rekonsiliasi, perhatian ekologis, spiritualitas Kristen, dan pengembangan karakter Kristen. Elemen-elemen ini menjadi ekspresi nyata dari karya Roh Kudus yang membaptis orang percaya, memberdayakan mereka untuk terlibat dalam transformasi masyarakat. Agar misi holistik ini berhasil, diperlukan kolaborasi yang erat antara gereja, sekolah teologi, dan badan misi. Langkah ini dimulai dengan perancangan kurikulum teologi yang menekankan misi holistik, yang kemudian diintegrasikan dengan pelayanan gereja dan badan misi untuk menciptakan agen-agen perdamaian (*peace makers*) yang aktif di masyarakat, termasuk aspek politik.<sup>25</sup> Melalui kerja sama yang terintegrasi dan berpusat pada peran Roh Kudus, internalisasi misi holistik dalam konteks gereja, khususnya gereja Pentakostal-Kharismatik, dapat dipercepat dan menghasilkan dampak yang signifikan bagi komunitas lokal maupun global.

### **Konstruksi Model Teologi Publik Perspektif Pentakostal yang Kontekstual di Indonesia: Sebuah Proposal**

Teologi publik Pentakostal di Indonesia memanfaatkan nilai-nilai pneumatologis sebagai landasan untuk merespons tantangan sosial-politik dalam konteks pluralisme agama, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Nilai-nilai pneumatologis ini mencakup pemahaman tentang karya Roh Kudus sebagai sumber kekuatan transformatif yang tidak hanya menguduskan individu tetapi juga menggerakkan komunitas gereja untuk berpartisipasi dalam pemulihan sosial. Dalam konteks pluralisme agama, pneumatologi Pentakostal menekankan inklusivitas dan penerimaan terhadap keberagaman melalui konsep "hospitalitas Roh" yang memungkinkan gereja menjadi ruang dialog yang ramah bagi semua golongan. Selain itu, konsep pembaruan melalui Roh (regenerasi dan pentahiran) mendorong gereja untuk menumbuhkan kepekaan terhadap isu-isu ketidakadilan sosial dan untuk bertindak sebagai saksi Kristus melalui pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan komunitas.

Dalam misi holistik, nilai-nilai pneumatologis terwujud dalam bentuk pemberdayaan sosial yang dipimpin oleh pengajaran Roh Kudus yang menggerakkan hati nurani umat untuk melayani dengan kasih dan keadilan. Gereja Pentakostal menginterpretasikan kehadiran Roh Kudus sebagai kuasa yang membebaskan, sebagaimana tercermin dalam tindakan-tindakan nyata seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, advokasi terhadap kelompok rentan, dan pendidikan yang mempromosikan kesetaraan. Misalnya, melalui doa dan manifestasi karunia Roh Kudus, gereja Pentakostal dapat membangun solidaritas komunitas yang menembus batas-batas etnis, agama, dan status sosial. Dengan demikian, nilai-nilai pneumatologis memberikan landasan teologis bagi gereja untuk menjalankan misi transformasi sosial secara kontekstual, menjaga keseimbangan antara tanggung jawab spiritual dan sosial-politik.

---

<sup>24</sup> Anderson, "Pentecostalism and Social, Political, and Economic Development," 126.

<sup>25</sup> Andrew M Lord, "The Holy Spirit and Contextualization," *Asian Journal of Pentecostal Studies* 4, no. 2 (2002): 201–213.

Dalam upaya membentuk dan memengaruhi etos masyarakat, gereja Pentakostal di Indonesia mengimplementasikan pemuridan dan program pelayanan sosial sebagai sarana strategis untuk menginternalisasi nilai-nilai moral dan etis di tengah jemaat. Melalui ajaran yang berfokus pada keadilan distributif, kesetaraan struktural, dan rekonsiliasi sosial, gereja tidak hanya menjadi ruang pembentukan karakter individual tetapi juga agen perubahan sosial yang aktif. Pendekatan ini sejalan dengan *tipologi profetik* yang dikemukakan Wogaman, di mana gereja berperan sebagai *moral arbiter* yang berupaya menavigasi dan mengoreksi roh zaman (*zeitgeist*) dalam konteks sosial-politik tertentu. Di Indonesia, implementasi ini secara strategis diarahkan untuk merespons tantangan seperti kemiskinan yang sistemik dan korupsi yang terinstitusionalisasi, dengan tetap memperhatikan sensitivitas relasi antaragama dan harmoni sosial. Secara kontekstual, strategi ini mencerminkan penerapan teologi transformatif yang menempatkan gereja sebagai mitra kritis negara dan masyarakat dalam memperjuangkan keadilan sosial. Program-program pemuridan dikemas tidak hanya untuk pembentukan spiritualitas personal tetapi juga untuk meningkatkan literasi etis dan keberpihakan terhadap kelompok termarjinalkan. Gereja Pentakostal, dengan pendekatan ini, menekankan pentingnya *public theology* yang berpijak pada dialog konstruktif dengan komunitas mayoritas, tanpa mengorbankan integritas teologisnya. Dengan demikian, gereja menjalankan fungsi ganda sebagai komunitas iman yang melengkapi anggotanya untuk menjadi warga negara yang beretika, sekaligus menjadi pelopor dalam menciptakan keadilan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Tipologi kedua, yaitu mendidik jemaat mengenai isu-isu sosial, menempatkan gereja Pentakostal pada posisi strategis sebagai institusi pendidikan moral dan sosial yang relevan. Melalui program pelatihan, seminar, dan diskusi interaktif, gereja membekali jemaat dengan pemahaman kritis terhadap berbagai isu struktural seperti eksploitasi sumber daya alam, intoleransi antaragama, dan kesenjangan akses pendidikan. Pendidikan ini dirancang secara holistik untuk mengintegrasikan pengajaran spiritual dengan wawasan sosial-politik yang kontekstual, sehingga membentuk jemaat yang tidak hanya beriman secara mendalam tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan fungsi gereja sebagai mediator yang menjembatani iman dan aksi dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana diidealkan dalam teologi publik. Gereja Pentakostal mengedepankan pentingnya keberpihakan terhadap keadilan ekologis dan sosial dengan cara melengkapi jemaat untuk memahami keterkaitan antara keimanan dan tanggung jawab sosial. Melalui pembelajaran yang partisipatif, jemaat diajak untuk menganalisis isu-isu sosial-politik dari perspektif teologis, sekaligus mengembangkan sikap yang proaktif dalam memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pendidikan sosial yang diterapkan gereja tidak hanya membangun kesadaran tetapi juga memobilisasi jemaat untuk berkontribusi secara konkret dalam transformasi masyarakat.

Tipologi ketiga, menggiatkan lobi kepada pemerintah, gereja Pentakostal di Indonesia selama ini tidak melakukan tindakan lobi yang berarti. Meskipun dalam perkembangannya, beberapa gereja Pentakostal, di dalamnya GBI, menunjukkan strategi adaptif yang cermat, memanfaatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil (seperti keterlibatan dalam TAGANA Rajawali) dan jaringan ekumenis sebagai saluran diplomasi. Keikutsertaan gereja-gereja Pentakostal di Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) membuka peluang tersebut.<sup>26</sup> Langkah ini tidak hanya memperkuat posisi gereja sebagai bagian dari masya-

---

<sup>26</sup> Anggi maringan Hasiholan, *Oikumenika Dalam Sejarah, Teologi, Dan Praksis: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rhema Makmur, 2024).

rakat sipil tetapi juga memungkinkan penyampaian pandangan tentang kebijakan publik secara strategis tanpa menciptakan antagonisme atau gesekan dengan komunitas mayoritas. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman gereja Pentakostal terhadap kompleksitas dinamika pluralisme agama di Indonesia, di mana harmoni dan moderasi sosial sering kali menjadi prioritas. Dengan demikian, gereja Pentakostal dapat berperan aktif dalam advokasi kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial, sekaligus menjaga hubungan yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan. Konteks sosial-politik Indonesia, yang diwarnai isu-isu progresif seperti hak LGBTQ+, keadilan gender, dan toleransi, menuntut gereja Pentakostal untuk mengembangkan pendekatan yang bijak dan teologis. Gereja Pentakostal menghadapi tantangan untuk menemukan keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai konservatif yang menjadi identitas teologisnya dan kebutuhan untuk hidup harmonis di tengah masyarakat multikultural. Dalam hal ini, teologi publik yang menonjolkan prinsip keadilan, solidaritas, dan kebaikan bersama dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan gereja untuk tetap relevan dalam masyarakat, dengan menawarkan narasi alternatif yang mengedepankan integrasi iman dan aksi, sekaligus berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang inklusif tanpa kehilangan integritas spiritualnya.

Tipologi keempat hingga ketujuh yang diajukan oleh Wogaman menghadirkan sejumlah tantangan dan keterbatasan, terutama mengingat posisi gereja Pentakostal sebagai “minoritas” agama. Partisipasi gereja dalam mendukung calon tertentu untuk jabatan publik, misalnya, sering kali dianggap tidak strategis. Hal ini disebabkan oleh potensi politisasi gereja yang dapat merusak netralitas dan integritas spiritualnya. Dukungan kepada kandidat tertentu juga berisiko memperbesar polarisasi sosial. Selain itu, kurangnya evaluasi kritis terhadap kebijakan kandidat dapat menciptakan bias sektarian yang bertentangan dengan tanggung jawab gereja untuk mendorong keadilan sosial secara universal. Gereja Pentakostal “takut” untuk melakukan ini karena dapat memecah anggota jemaat yang memiliki pilihan lain. Atau memilih netral demi perdamaian. Namun, dewasa ini umat Pentakostal semakin berani untuk mendukung pasangan calon tertentu secara terang-terangan.

Pendirian partai politik berbasis agama oleh komunitas Pentakostal juga dinilai tidak relevan di Indonesia. Komunitas Pentakostal, pernah mendukung dan ikut berpartisipasi pendirian Partai Damai Sejahtera (PDS), dengan tokoh seperti Ruyandi Hutasoit, Rahmat Manulang, dan Pati Stefanus Ginting yang dikenal sebagai figur Pentakostal. PDS mencapai puncaknya pada Pemilu 2004 dengan memperoleh 2,13% atau 2.414.254 suara nasional dan 13 kursi di DPR, namun gagal bertahan di Pemilu 2009 setelah hanya meraih 1,47% suara, sehingga tidak lolos ambang batas parlemen. Keberagaman denominasi internal, basis pemilih yang terbatas, dan kurangnya narasi politik yang kuat menjadi faktor utama kejatuhan partai ini. Sejarah PDS menunjukkan bahwa pendirian partai politik berbasis agama, termasuk oleh komunitas Pentakostal, menghadapi tantangan besar di Indonesia, sehingga fokus pada misi spiritual dan pelayanan sosial lebih relevan dalam menjaga kesaksian gereja di masyarakat majemuk.

Gereja Pentakostal di Indonesia lebih memusatkan perhatian pada transformasi spiritual jemaat daripada mengambil tindakan pembangkangan sosial yang berpotensi memicu konflik. Pendekatan seperti ini mencerminkan teologi mereka yang menekankan kesetiaan kepada otoritas dan damai sejahtera sebagai prioritas utama. Pembangkangan sosial, meskipun bisa menjadi bentuk protes terhadap ketidakadilan, berisiko menimbulkan stigmatisasi terhadap komunitas Pentakostal, terutama di tengah masyarakat yang mayoritasnya memegang pandangan agama berbeda. Langkah seperti itu juga dapat memancing resisten-

si dari pihak pemerintah, yang dapat memperumit posisi gereja sebagai kelompok minoritas dalam konteks sosial-politik Indonesia yang sensitif terhadap isu agama.

Partisipasi dalam revolusi bukanlah langkah yang diambil oleh komunitas Pentakostal di Indonesia, mengingat teologi mereka lebih berfokus pada pengharapan eskatologis dan perdamaian daripada perubahan struktural yang radikal. Dalam konteks sistem demokrasi Pancasila yang relatif stabil, revolusi tidak hanya dianggap tidak relevan, tetapi juga berpotensi merusak hubungan harmonis antara gereja dan negara. Langkah ini membawa risiko besar, termasuk menjadi sasaran represi dari pihak berwenang, yang dapat memperburuk posisi gereja sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, kami mengusulkan model teologi publik berbasis hospitalitas dan *theo-poetics* menjadi salah satu pendekatan inovatif yang relevan dalam menjembatani spiritualitas dan keterlibatan sosial di Indonesia.<sup>27</sup> Konsep hospitalitas, yang mengutamakan penerimaan tanpa syarat terhadap sesama<sup>28</sup>, dapat diperkuat melalui prinsip *theo-poetics*, yaitu penghayatan keindahan teologi dalam bentuk narasi, simbol, dan tindakan nyata. Dalam konteks budaya Indonesia, nilai *gotong royong* yang telah mengakar kuat menjadi salah satu sarana untuk merealisasikan pendekatan ini. *Gotong royong* mencerminkan semangat kebersamaan yang sejalan dengan nilai-nilai Injil tentang kasih dan pelayanan kepada sesama. Gereja Pentakostal dapat memanfaatkan prinsip ini untuk membangun aliansi strategis dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Sebagai contoh, gereja dapat terlibat dalam program-program sosial-politik, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya dimensi teologis pelayanan gereja tetapi juga memperkuat kohesi sosial dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam upaya menciptakan perubahan sosial yang positif. Hospitalitas adalah gerakan spiritual yang mempersiapkan ruang, termasuk ruang publik, bagi Allah untuk hadir melalui penerimaan terhadap orang lain, sebuah prinsip yang dapat diaplikasikan dalam pelayanan Pentakostal di Indonesia.

Pendidikan teologi juga memiliki peran penting dalam mengembangkan teologi publik Pentakostal yang relevan dengan tantangan zaman. Seperti yang diusulkan oleh Yong dalam *Spirit-Word-Community: Theological Hermeneutics in Trinitarian Perspective*, kurikulum pendidikan teologi perlu mengintegrasikan penginjilan dengan isu-isu publik, sehingga lulusan institusi teologi tidak hanya berfokus pada pelayanan gerejawi tetapi juga mampu terlibat secara aktif dalam transformasi sosial.<sup>29</sup> Dalam konteks Indonesia, isu-isu sosial-politik, seperti pluralisme agama, reformasi hukum, dan keadilan sangat relevan untuk diintegrasikan ke dalam pendidikan teologi. Sebagai contoh, pendidikan teologi dapat mencakup diskusi mengenai cara menjawab tantangan politik praktis dan politik balas dendam dengan pendekatan pneumatologis, di mana Roh Kudus dipahami sebagai sumber hikmat dan panduan untuk berani menyuarakan suara kenabian. Dengan demikian, pendidikan teologi yang menekankan praktik pneumatologis akan menghasilkan pemimpin gereja yang memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial sekaligus kemampuan untuk memberikan solusi teologis yang holistik.

---

<sup>27</sup> Anggi Maringan Hasiholan, "Misi Yang Ramah Dan Estetis: Rekonstruksi Misiologi Pentakostal Melalui Perspektif Hospitalitas Dan Teopoetik," *Dunamis : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (2024): 882–898.

<sup>28</sup> Serva Tuju et al., "Hospitalitas Pendidikan Kristiani Dalam Masyarakat Majemuk," *Jurnal Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 328–339.

<sup>29</sup> Amos Yong, *Spirit-Word-Community: Theological Hermeneutics in Trinitarian Perspective* (Aldershot: Ashgate, 2006).

Teologi publik Pentakostal di Indonesia menuntut gereja untuk mengambil peran profetik, yang tidak hanya berfungsi sebagai pengkritik sosial tetapi juga pembawa harapan yang mendorong perubahan struktural. Dalam tradisi Pentakostal, peran profetik tidak hanya berakar pada pewartaan kebenaran tetapi juga pada tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Gereja dapat menjadi suara bagi mereka yang tertindas, seperti kelompok miskin, perempuan, dan masyarakat adat, dengan mendukung kebijakan yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Menurut Steven Félix-Jäger, peran profetik adalah mengganggu kenyamanan struktur yang menindas dan sekaligus membayangkan realitas baru yang mencerminkan Kerajaan Allah.<sup>30</sup> Gereja Pentakostal di Indonesia memiliki peluang untuk menerapkan hal ini dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti memperjuangkan akses pendidikan yang merata, mengadvokasi reformasi sistem hukum yang adil, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, gereja juga dapat memperkuat solidaritas sosial melalui program-program yang memberdayakan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan bagi kaum muda atau bantuan ekonomi bagi keluarga miskin. Dengan mengadopsi pendekatan ini, gereja tidak hanya menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat tetapi juga menjadi agen transformasi sosial yang membawa dampak nyata.

## KESIMPULAN

Tujuh tipologi partisipasi gereja dalam politik yang dirumuskan Philip J. Wogaman memberikan kerangka konseptual yang penting untuk memahami level keterlibatan umat Pentakostal dalam ruang publik. Tipologi ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari memengaruhi etos masyarakat, mendidik jemaat mengenai isu-isu sosial-politik, hingga partisipasi dalam tindakan yang lebih radikal seperti pembangkangan sosial atau bahkan revolusi. Gereja Pentakostal di Indonesia dapat memanfaatkan tipologi ini untuk menavigasi perannya sebagai komunitas religius yang aktif dalam kehidupan sosial dan politik tanpa kehilangan integritas teologisnya. Implementasi partisipasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks lokal, seperti posisi gereja sebagai minoritas dan sensitivitas relasi antaragama di Indonesia. Gereja Pentakostal berpotensi memberikan kontribusi strategis melalui pendidikan sosial bagi jemaat, advokasi kebijakan publik, serta program-program pelayanan yang berorientasi pada keadilan sosial.

Netralitas politik demi perdamaian sering menjadi pendekatan gereja Pentakostal di Indonesia, meskipun tidak termasuk dalam tujuh level partisipasi yang disebutkan oleh Wogaman. Sikap ini dianggap relevan dalam menjaga harmoni sosial di tengah tantangan pluralisme agama dan potensi konflik antarumat beragama. Netralitas politik membantu gereja untuk tetap menjadi pihak yang inklusif dan tidak memicu polarisasi dalam masyarakat. Namun, gereja perlu memastikan bahwa sikap netral tidak berujung pada apatisme terhadap isu-isu sosial yang mendesak. Teologi publik Pentakostal harus mengintegrasikan panggilan profetiknyanya dengan tanggung jawab menjaga perdamaian, memungkinkan gereja menjadi agen transformasi yang relevan tanpa kehilangan jati diri sebagai saksi Kristus di ruang publik.

---

<sup>30</sup> Steven Félix-Jäger, *Pentecostal Aesthetics: Theological Reflections in a Pentecostal Philosophy of Art and Aesthetics* (Leiden and Boston: Brill, 2015).

## REFERENSI

- Anderson, Allan Heaton. "Pentecostalism and Social, Political, and Economic Development." *Spiritus* 5, no. 1 (2020): 121–136.
- Augustine, Daniela C. "Pentecost and Prosperity in Eastern Europe: Between Sharing of Possessions and Accumulating Personal Wealth." In *Pentecostalism and Prosperity: The Socioeconomics of the Global Charismatic Movement*, edited by Katherine Attanasi and Amos Yong, 189–212. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
- Bartelink, Brenda. "The Personal Is Political: Pentecostal Approaches to Governance and Security." *Review of Faith and International Affairs* 18, no. 3 (2020): 69–75.
- Cartledge, Mark J. "British Pentecostalism and Public Theology: Navigating the Path between Discipleship and Citizenship." *Journal of the European Pentecostal Theological Association* 41, no. 2 (2021): 108–123. <https://doi.org/10.1080/18124461.2021.1954259>.
- Chia, Edmund Kee-Fook. *Asian Christianity and Theology: Inculturation, Interreligious Dialogue, Integral Liberation*. London & New York: Routledge, 2022.
- Félix-Jäger, Steven. *Pentecostal Aesthetics: Theological Reflections in a Pentecostal Philosophy of Art and Aesthetics*. Leiden and Boston: Brill, 2015.
- Graham, Elaine, and Stephen Lowe. *What Makes a Good City? Public Theology and the Urban Church*. Darton, Longman & Todd Ltd, 2009.
- Hardiman, Budi F. "Demokrasi Delibelatif: Model Untuk Indonesia Pasca-Soeharto?" *Basis*, 2004.
- Hasiholan, Anggi maringan. *Oikumenika Dalam Sejarah, Teologi, Dan Praksis: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rhema Makmur, 2024.
- Hasiholan, Anggi Maringan. "Misi Yang Ramah Dan Estetis: Rekonstruksi Misiologi Pentakostal Melalui Perspektif Hospitalitas Dan Teopoetik." *Dunamis : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (2024): 882–898.
- — —. "Spiritualitas Dan Teologi Sosial Pentakostal Asia." *Manna Rafflesia* 10, no. 1 (2023): 358–377.
- Lord, Andrew M. "The Holy Spirit and Contextualization." *Asian Journal of Pentecostal Studies* 4, no. 2 (2002): 201–213.
- Marti, Gerardo. "I Determine My Harvest": Risky Careers and Spirit-Guided Prosperity in Los Angeles." In *Pentecostalism and Prosperity: The Socioeconomics of the Global Charismatic Movement*, edited by Katherine Attanasi and Amos Yong, 131–150. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
- Miller, Donald E., and Tetsunao Yamamori. *Pentecostalism Global: The New Face of Christian Social Engagement*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 2016.
- Nolivos, Eloy H. "Capitalism and Pentecostalism in Latin America: Trajectories of Prosperity and Development." In *Pentecostalism and Prosperity: The Socioeconomics of the Global Charismatic Movement*, edited by Katherine Attanasi and Amos Yong, 87–106. New York: Palgrave Macmillan, 2012.
- Tuju, Serva, Harls Evan R. Siahaan, Melkius Ayok, Fereddy Siagian, and Donna Sampaleng. "Hospitalitas Pendidikan Kristiani Dalam Masyarakat Majemuk." *Jurnal Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 328–339.
- Wogaman, J. Philip. *Christian Perspectives on Politics*. Louisville: Westminster John Knox Press, 2000.
- Yong, Amos. *In the Days of Caesar: Pentecostalism and Political Theology*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing, 2010.
- — —. *In the Days of Caesar: Pentecostalism and Political Theology*. Grand Rapids: William B. Eerdmans, 2010.
- — —. *Spirit-Word-Community: Theological Hermeneutics in Trinitarian Perspective*. Aldershot: Ashgate, 2006.